

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP TAHUN 1955-1956**ACHMAD MUDJIONO**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email : Achmadmudjiono7@gmail.com

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan Kabinet kelima pada masa demokrasi parlementer di Indonesia. Kabinet ini terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali I, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatur kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatur kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah. Kabinet ini mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Semasa pemerintahannya, Burhanuddin Harahap berusaha menstabilkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada saat itu. Meskipun demikian dalam perjalanannya kabinet ini juga mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan kabinet ini demisioner. Pembahasan ini menarik untuk diteliti mengingat kabinet ini tidak berumur panjang hanya sekitar kurang lebih 7 bulan saja, tetapi masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengadakan perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, serta politik dan dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur. Burhanuddin juga berhasil menyelenggarakan pemilihan umum dan berhasil mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana proses terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap?; 2) Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan Politik pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap?. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode heuristik, kritik dan intepretasi sumber, serta historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjalanan Kabinet Burhanuddin Harahap dari sisi kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada tahun 1955 hingga 1956. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setting penelitian dilakukan di pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap, diantaranya; 1) Kabinet Burhanuddin terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjoyo I yang tersandung peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai; 2) Burhanuddin Harahap berhasil mengatasi masalah inflasi yaitu dengan jalan mengadakan penghematan keras dalam banyak pengeluaran, terutama pengeluaran rutin yang berlebihan, menyempurnakan penerimaan pajak dan memperbaiki cara-cara dan dasar pemungutan, terus berlangsungnya serta dipegang teguh peraturan yang telah berjalan mengenai pengawasan preventif oleh pihak Kementerian Keuangan. Selain itu Burhanuddin juga mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk didalamnya menekan harga barang-barang, baik harga barang impor maupun harga beberapa macam barang-barang dalam negeri yang merupakan kebutuhan sehari-hari, serta berhasil mengatasi masalah korupsi dengan jalan menindak dan menjebloskan ke penjara bagi siapa saja yang melakukan tindakan korupsi tanpa pandang bulu. Burhanuddin juga berhasil mengembalikan citra pemerintah dimata angkatan darat dan masyarakat Kabinet Burhanuddin juga berhasil melaksanakan pemilihan umum yang pertama kali di Indonesia yang berjalan dengan aman, tertib dan demokratis. Akhirnya Kabinet demisioner pada tanggal 3 Maret 1956 setelah kehilangan prestigenya ketika usahanya mengontrol Angkatan Udara gagal serta kegagalan menyelesaikan pembatalan perjanjian KMB dan hasil pemungutan suara itu diumumkan.

Kata Kunci : Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, Kabinet Burhanuddin Harahap, 1955-1956.

Abstract

The Burhanuddin Harahap Cabinet is the fifth Cabinet in the period of parliamentary democracy in Indonesia. This cabinet was formed after the fall of the Ali I Cabinet, instead of Vice President Dr. Muh.

Hatta pointed Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) as a cabinet formation. This incident was the first time in Indonesia, the cabinet formation was appointed by the Vice President as a result of Soekarno's departure to the Hajj to Mecca. This cabinet began work after being inaugurated on 12 August 1955 led by Burhanuddin Harahap. During his reign Burhanuddin Harahap tried to stabilize the social, economic and political conditions of Indonesia at that time. Nevertheless, in the course of this cabinet also experienced the obstacles that caused this cabinet demissioner. This discussion is interesting to examine since this cabinet did not last long only about 7 months, but the reign of Burhanuddin Harahap's Cabinet succeeded in making improvements in the social, economic, and political fields and it can be said that people's life during the cabinet was quite prosperous. Burhanuddin also managed to hold elections and succeeded in restoring the government's authority over the Army and the public.

Based on the background of the problem then the formulation of the problem in this study are as follows: 1) How the process of formation Burhanuddin Cabinet Harahap ?; 2) What are the social, economic, and political conditions during the reign of the Burhanuddin Harahap Cabinet ?. The data collection technique is done by heuristic method, criticism and source interpretation, and historiography. This study aims to describe the Burhanuddin Harahap Cabinet travel from the social, economic and political conditions in 1955 to 1956. This study used a qualitative approach. The research setting is done in the central government of the Republic of Indonesia.

The results of this study indicate that the socio-economic conditions of the government Cabinet Burhanuddin Harahap, among others; 1) Burhanuddin Cabinet was formed after the fall of the Ali Sastroamidjyo Cabinet that stumbled on the Army incident on 27 June 1955. Burhanuddin Harahap's cabinet was a coalition cabinet consisting of several parties; 2) Burhanuddin Harahap succeeds in overcoming the problem of inflation by making hard savings in many expenses, especially excessive routine spending, refining tax revenues and improving the ways and basis of collection, continuing and firmly adhered to the prevailing regulations on preventive monitoring by parties Ministry of Finance. In addition Burhanuddin also made economic improvements, including in pressing the price of goods, both the price of imported goods and the price of several kinds of goods in the country which is a daily necessity, and managed to overcome the problem of corruption by taking action and throw into prison for whom Alone who commit acts of corruption indiscriminately. Burhanuddin also managed to restore the image of the government in the army and the people of Burhanuddin Cabinet also succeeded in conducting the first election in Indonesia that runs safely, orderly and democratic. Finally the Democratic Cabinet on March 3, 1956 after losing his prestige when his attempts to control the Air Force failed and the failure to complete the cancellation of the KMB agreement and the result of the vote was announced.

Keywords: Social, Economic and Political Condition, Cabinet Burhanuddin Harahap, 1955-1956.

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para Pendiri Negara Indonesia (the Founding Fathers) melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy).

Penetapan paham demokrasi sebagai tataan pengaturan hubungan antara rakyat disatu pihak dengan negara dilain pihak oleh Para Pendiri Negara Indonesia yang duduk di BPUPKI tersebut, kiranya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa sebagian terbesarnya pernah mengecap pendidikan Barat, baik mengikutinya secara langsung di negara-negara Eropa Barat (khususnya Belanda), maupun mengikutinya melalui pendidikan lanjutan atas dan

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia sejak beberapa dasawarsa sebelumnya, sehingga telah cukup akrab dengan ajaran demokrasi yang berkembang di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Tambahan lagi suasana pada saat itu (Agustus 1945) negara-negara penganut ajaran demokrasi telah keluar sebagai pemenang Perang Dunia-II.

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang Indonesia sudah melaksanakan tiga tipe demokrasi. Tiga tipe demokrasi tersebut adalah Demokrasi Liberal (1950-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Demokrasi Pancasila (1966-sekarang). Indonesia setelah kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia memakai Sistem Demokrasi Parlementer. Sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 adalah sistem kabinet Parlementer, dimana setiap kabinet yang berkuasa harus mendapat dukungan sebagian besar

dari parlemen (DPR pusat).¹ Presiden hanya sebagai simbol yaitu mempunyai kedudukan tetapi tidak mempunyai kekuasaan. Presiden berwenang membentuk formatur kabinet, apabila terjadi krisis kabinet dalam pemerintahan.

Tahun 1950 sampai tahun 1959, terdapat sejumlah kabinet yang memerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam setiap tahunnya selalu berganti kabinet. Kabinet-kabinet itu diantaranya adalah Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (Juli 1953-Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjoyo II (1956-1957) dan kabinet Djuanda (1957-1959).²

Setelah jatuhnya Kabinet Ali I, sebagai gantinya Wakil Presiden Dr. Muh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai formatur kabinet. Kejadian ini baru pertama kali di Indonesia, formatur kabinet ditunjuk oleh Wakil Presiden sebagai akibat dari kepergian Soekarno naik Haji ke Mekkah. Kabinet ini terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Wakil Presiden Nomor 141 tahun 1955 tertanggal 11 Agustus 1955 dan mulai bekerja setelah dilantik tanggal 12 Agustus 1955 dengan dipimpin oleh Burhanuddin Harahap.³ Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai, hampir merupakan Kabinet Nasional sebab jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini berjumlah 13 partai. Kabinet ini termasuk kabinet koalisi, ini dikarenakan masih ada beberapa partai oposisi yang tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya.

Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, adalah 1)Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moril pemerintah, i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, 2)Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru, 3)Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, 4)Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, 5)Memberantas korupsi, 6)Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, dan 7)Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Keberhasilan kabinet Burhanuddin Harahap adalah 1) menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada

29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante), 2) Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat dan masyarakat, 3) berhasil mengadakan perbaikan ekonomi termasuk di dalamnya keberhasilan mengendalikan harga dan mencegah terjadinya inflasi. Dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi. 4) berhasil memberantas korupsi dengan mengadakan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigainya, seperti Djody Gondokusumo bekas Menteri Kehakiman masa Kabinet Ali.

Semasa pemerintahannya, Burhanuddin Harahap berusaha menstabilkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia pada saat itu. Meskipun demikian dalam perjalanannya kabinet ini juga mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan kabinet ini demissioner. Atas dasar uraian diatas penulis berusaha mengkaji lebih dalam mengenai "Kondisi Sosial Ekonomi pada Masa Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)". Pembahasan ini menarik untuk diteliti mengingat kabinet ini tidak berumur panjang hanya sekitar kurang lebih 7 bulan saja, tetapi masa pemerintahan kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengadakan perbaikan dalam bidang sosial, ekonomi, serta politik dan dapat dikatakan kehidupan rakyat semasa kabinet cukup makmur, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum, dan berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat.

METODE

Untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Ada empat tahapan di dalam metode penelitian sejarah yaitu :

Penelusuran Sumber (Heuristik), Kemampuan menemukan dan menghimpun sumber-sumber yang diperlukan dalam penulisan sejarah biasa dikenal sebagai tahap heuristik.⁴ Sumber atau data sejarah ada dua macam, yaitu sumber tertulis (dokumen) dan sumber tidak tertulis (artefact). Pada tahap ini peneliti akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sesuai dengan apa yang akan diteliti dengan menggunakan studi kepustakaan. Sejarawan menganggap bahwa sumber-sumber asli sebagai sumber pertama (primary sources), sedangkan apa yang telah ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya berdasarkan sumber-sumber pertama disebut (secondary sources). Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari seseorang yang bukan pelaku

¹ Moedjanto. *Indonesia Abad ke-20 Jilid II*. Yogyakarta: Kanisius. 1992, hlm.77.

² Zulkarnain. *Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Pujangga Press. 2012, hlm. 104.

³ Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Program Kabinet. Jakarta : Kementerian Penerangan RI. 1955, hlm. 3.

⁴ Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm. 147.

atau saksi peristiwa tersebut, dengan kata lain hanya tahu informasi dari kesaksian orang lain.⁵ Sumber sekunder penulis dapatkan dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di Surabaya seperti Laboratorium Sejarah Unesa, Perpustakaan UPT Unesa, Perpustakaan Nasional Indonesia. Sumber Sekunder yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini, antara lain, jurnal, artikel, majalah, dan buku-buku yang relevan.

Kritik Sumber, Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama. Kritik ini menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu. Hal ini berujuan agar penulis tidak menerima begitu saja informasi yang berasal dari sumber-sumber yang telah diperoleh, namun juga mampu menganalisis secara kritis tentang keabsahan sumber. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan kritik intern. 1) Kritik Ekstern, Kritik ekstern adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Helius Sjamsuddin menjelaskan tentang arti Kritik ekstern adalah suatu peneliti atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang atau tidak. Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber. Tetapi dalam penelitian tidak dilakukan karena fokusnya hanya pada kritik intern. 2) Kritik Intern, Kritik intern merupakan kelanjutan dari kritik ekstern yakni untuk meneliti kebenaran isi dokumen. Setelah kesaksian fakta ditegakan melalui kritik eksternal, berikutnya adalah mengadakan evaluasi terhadap kredibilitas isi dari kesaksian tersebut. Kritik intern digunakan untuk menguji kredibilitas sumber yang terkumpul. Pengujian kebenaran isi data dilakukan untuk menghasilkan fakta yang diakui kebenarannya.

Interpretasi Sumber, Tahap ketiga yaitu interpretasi merupakan proses pengolahan data yang diperoleh penulis setelah melakukan metode heuristik kemudian kritik. Sehingga pada tahapan ini penulis akan mencari hubungan antara fakta yang telah ditemukan. Penulis dalam langkah ketiga ini melakukan proses pemahaman atau penerjemahan terhadap sumber – sumber atau data – data yang sudah diperoleh untuk menetapkan serta memperoleh makna dari inti kajian yang dibahas. Rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah

Historiografi, Penulisan merupakan tahapan terakhir dalam metodologi sejarah. Penulisan merupakan kegiatan menyusun fakta-fakta menjadi sejarah, setelah melakukan

pencarian sumber, kritik sumber dan penafsiran kemudian dituangkan menjadi suatu kisah sejarah dalam bentuk tulisan. Aspek kronologi merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Burhanuddin Harahap memiliki peran penting dalam dunia perpolitikan Indonesia. Burhanuddin Harahap berperan aktif demi kemajuan bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam kiprahnya, Burhanuddin Harahap aktif dalam partai dan beberapa organisasi masa pergerakan yang punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Burhanuddin Harahap menjabat beberapa kedudukan penting dalam pemerintahan, hingga pada masa demokrasi parlementer Burhanuddin Harahap menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan (1955-1956). Untuk memperdalam pengetahuan tentang terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap, maka akan diuraikan latar Belakang kehidupan Burhanuddin Harahap, terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap, Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap, serta Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap.

A. Latar Belakang Kehidupan Burhanuddin Harahap

Burhanuddin Harahap dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1917 di Medan, Sumatera Utara.⁶ Burhanuddin Harahap merupakan putra dari pasangan suami istri Muhammad Yunus dan Siti Nurfiyah. Muhammad Yunus merupakan seorang Mantri Polisi yang bekerja pada kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Timur tepatnya di Tanjung Balai. Orang tua Burhanuddin berasal dari Tapanuli. Burhanuddin merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Burhanuddin Harahap dibesarkan dalam keluarga muslim. Hal inilah yang nantinya mempengaruhi perkembangan pemikiran Burhanuddin Harahap dalam setiap kebijakannya. Meskipun dilahirkan di Medan, tetapi sejak kecil ia tidak pernah menetap di Medan. Hidup Burhanuddin berpindah-pindah karena mengikuti dimana ayahnya ditugaskan. Ketika tiba masa sekolah, Burhanuddin dimasukkan ke dalam HIS (Hollands Inlandse School) yang berada di Bagan siapi-api dekat Tanjung Balai. Meskipun orang tua berpindah-pindah, Burhanuddin tetap bersekolah di Tanjung Balai dengan jalan menyewa kost karena tidak semua daerah terdapat HIS (Hollands Inlandse School). Setelah lulus dari HIS, ia kemudian melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan. Selepas belajar dari MULO Padang, pada tahun 1935 Burhanuddin hijrah ke Jawa untuk melanjutkan

⁵ I Gde Widja, *Sejarah Lokal dan Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, hlm. 18.

⁶ Suswanta, *Keberanian untuk Takut: Tiga Tokoh Masyarakat dalam Drama PRRI*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 22.

pendidikannya ke AMS A-2 (Algemene Middelbare School)⁴, di Yogyakarta.

Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, Burhanuddin mengambil Jurusan Western Klas Sieke Afdeling. Di Yogyakarta Burhanuddin tinggal disebuah kamar kost, ia meneruskan ke Yogyakarta dengan alasan saat itu kota ini terkenal kota pelajar paling murah. Harga kebutuhan, makanan juga murah sehingga bisa berhemat dan sisanya untuk membeli raket. Semasa bersekolah di AMS (Algemene Middelbare School), Burhanuddin gemar membaca surat kabar, surat kabar yang sering ia baca diantaranya adalah De Locomotif Semarang dan surat kabar Lokal Yogyakarta. Selain itu, sepulang sekolah ia gemar bermain tenis lalu setelah memenuhi kegemarannya ia bergegas untuk mengikuti les bahasa Belanda. Disela kesibukan belajarnya, Burhanuddin aktif dalam organisasi JIB (Jong Islamieten Bond). Jiwa Burhanuddin yang sejak kecil hidup ditengah-tengah keluarga yang beragama Islam sangat merasa cocok aktif dalam JIB (Jong Islamieten Bond).

Ketika lulus AMS (Algemene Middelbare School) di Yogyakarta tahun 1938, akhirnya Burhanuddin memutuskan untuk melanjutkan ke RHS (Rechts Hoge School),⁷ sekolah tinggi Hukum di Jakarta. Karena pada saat itu belum ada Universitas, adanya sekolah tinggi Kedokteran, Teknik, dan Hukum. Selama menempuh pendidikan di Jakarta, Burhanuddin juga masuk dalam SIS (Student Islam Studi Club), suatu perkumpulan mahasiswa Indonesia Islam yang tertarik pada masalah-masalah ke-Islaman. Kegiatan dari organisasi ini adalah memberi penjelasan, mengeluarkan majalah Islam supaya para mahasiswa mengetahui Islam lebih dalam. Pada organisasi ini, Burhanuddin menjabat sebagai Sekretaris. Selain di SIS (Student Islam Studi Club), Burhanuddin juga aktif dalam PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia).

Setelah kedatangan Jepang ke Indonesia, semua sekolah yang didirikan Belanda ditutup termasuk RHS (Rechts Hoge School) tempat Burhanuddin bersekolah. Kedatangan tentara Jepang tidak saja membawa perubahan politik, tetapi juga perubahan di bidang pendidikan. Burhanuddin terpaksa berhenti dari RHS (Rechts Hoge School). Meskipun tidak bersekolah, mahasiswa dari luar Jawa berkumpul dalam suatu organisasi. Kegiatan mereka membantu masalah keuangan sesama mahasiswa luar Jawa yang sama-sama sekolah di Jakarta. Teman seperjuangan Burhanuddin antara lain Chaerul Saleh dan Sukarni. Jepang sempat berbaik hati memberi rumah kost secara gratis di daerah dekat Menteng, tetapi ketika rumah kost itu akan

digunakan oleh pihak tentara Jepang maka mereka semua diusir. Akhirnya Burhanuddin bersama Chaerul Saleh dan Sukarni pindah dan menyewa kost di daerah Cikini 71. Burhanuddin memulai kembali pendidikan formalnya setelah Supomo menjadi Menteri Kehakiman dan Jepang membuka kembali sekolah tinggi Hakim dalam bentuk kursus. Karier Burhanuddin Harahap juga nampak dalam bidang peradilan, dimulai di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang (1942-1946). Setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka, Burhanuddin melanjutkan pendidikan formalnya di UGM (Universitas Gadjah Mada) Yogyakarta.

Pengabdian Burhanuddin secara formal bagi bangsa dan negara paling tidak telah dilakukan berturut-turut sejak permulaan Indonesia merdeka. Awalnya ia duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Assaat yang kantornya bermarkas di Purworejo. Setelah Agresi Militer Belanda II, Burhanuddin melangsungkan pernikahan dengan gadis Sangonan Godean, Sleman Yogyakarta bernama Siti Pariyah.⁸ Hasil dari pernikahan tersebut, Burhanuddin dikaruniai dua orang anak. Selain itu Burhanuddin juga aktif di GPII (Gerakan Pemuda Islam Indonesia) dan Partai Masyumi. Burhanuddin Harahap aktif dalam partai Masyumi sejak tahun 1946. Burhanuddin aktif dalam Masyumi berawal dari sebuah ajakan Pak Prawoto. Pak Prawoto merupakan seseorang yang dikenalnya pada organisasi SIS (Student Islam Studi Club), beliau merupakan ketua terakhir dari SIS. Pada waktu Indonesia menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), Burhanuddin duduk dalam Parlemen. Demikian pula setelah Indonesia menjadi negara kesatuan, Burhanuddin menjadi anggota DPRS (Dewan Perwakilan Rakyat Sementara). Posisinya di Parlemen ini terhenti sebentar karena ia harus mengemban jabatan sebagai Perdana Menteri sekaligus merangkap sebagai Menteri Pertahanan pada demokrasi liberal, menggantikan kabinet Ali Sastroamidjyo I yang telah berakhir. Di bawah kepemimpinannya sebagai perdana Menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Selain pemilu, masih banyak lagi program kerja kabinet ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moral pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah.
2. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
3. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
4. Memberantas korupsi.
5. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.

⁷ Suswanta, *op. cit.*, hlm. 23.

⁸ ANRI. *Dokumen Wawancara antara JR. Chaniago dengan Burhanuddin Harahap*, Jakarta 18 April 1980.

6. Memperkembangkan politik kerjasama Afrika-Asia, berdasarkan politik bebas aktif menuju perdamaian.

Seluruh program itu mendapat persetujuan hampir mutlak dari Parlemen. Pada masa kabinet ini, kondisi ekonomi relatif baik, upaya pemberantasan korupsi digalakan, yakni dengan dibuatnya RUU anti korupsi. Kabinet ini juga berhasil menyelesaikan masalah pemilihan KSAD A.H Nasution diangkat kembali menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat).

B. Sejarah Terbentuknya Kabinet Burhanuddin Harahap

Pada tanggal 24 Juli 1955, Kabinet Ali-Wongso-Arifin atau yang lebih dikenal dengan Kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandat kepada 33 Wakil Presiden Moh. Hatta. Hal ini terjadi karena Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I berakhir dikarenakan peristiwa 27 Juni 1955 yaitu pengangkatan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD menggantikan Jendral Bambang Sugeng dengan pangkat Jendral Mayor yang diboikot oleh Kolonel Zulkifli Lubis wakil KSAD yang merasa lebih berhak menduduki jabatan KSAD tersebut. Akibatnya pelantikan Bambang Utoyo gagal dan Kolonel Zulkifli Lubis diskorsing sementara waktu namun kemudian dicabut kembali. Setelah kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandatnya, Indonesia menjadi demisioner. Demisionernya kabinet Ali Sastroamidjoyo I, Indonesia kembali dihadapkan pada permasalahan yang sama, yakni kekosongan pemerintahan. Selama tujuh belas hari Indonesia mengalami krisis kabinet dan untuk kelangsungan pemerintahan harus dibentuk kabinet baru sesuai dengan UUDS 1950.

Baru dua hari setelah pengunduran kabinet diterima, selaku pengganti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Moh. Hatta memulai babak baru untuk segera mengadakan hearing dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan golongan. Mohammad Hatta mengadakan hearing (dengar pendapat) berturut-turut selama 3 hari yang berlangsung dari tanggal 26-28 Juli yang bertempat di kantor Wakil Presiden Merdeka Utara. Hearing pendapat pertama dimulai pada tanggal 26 Juli pukul 09.00 WIB dan berlangsung sampai pukul 13.30 WIB, dalam waktu itu telah selesai didengar 7 parpol. Ketujuh parpol itu adalah Masyumi yang dalam hal ini diwakili oleh Moh. Natsir, Dr. Sukiman, dan Mr. Burhanuddin Harahap; PNI diwakili Sidik Joyosukarto, S. Mangunsakoro, Sahilal Rasjad; PIR Hazairin diwakili Syamsudin St Makmur, T. Noor, Djanuismadi; PIR Wongso diwakili oleh S. Kartohadikusuma, Mr. Latuharhary dan Djahmuri; PKI diwakili oleh D.N Aidit, Ir. Sukirman dan Lukman; PSI diwakili oleh Subadio

Sastrosatomo, Hamid Algadri dan D. Syahrullah; sementara partai politik yang terakhir dalam hearing kemarin itu ialah PRN yang diwakili Bebassa Daeng Lalo, Rustam Palidih, S. Cokrosisworo, dan Loah.⁹ Muncul beberapa pendapat pada hearing hari pertama, diantaranya pendapat dari PIR Hazairin, Moh. Natsir (Masyumi), PNI, PIR Wongsonegoro dan PKI. PIR Hazairin menghendaki kabinet yang dipimpin oleh Hatta tetapi harus dengan persetujuan Parlemen. Moh. Natsir berpendapat yang dihadapi saat ini bukan krisis kabinet melainkan krisis gezag dan bukan saja membentuk kabinet tetapi mengembalikan dari gezag itu dan jalan yang akan memberikan terlaksananya pengembalian gezag adalah dengan pembentukan kabinet Presidensial. PNI berpendapat masalah ini akan dibawa kesidang DP PNI yang akan diadakan secepat mungkin. PIR Wongsonegoro menghendaki parlemen zaken kabinet dengan mendapat dukungan langsung dari partai-partai dari Parlemen sedangkan pendapat yang terakhir dari PKI yaitu PKI menghendaki kabinet parlementer.

Keesokan harinya tanggal 27 Juli masih ditempat yang sama hearing dilanjutkan kembali dengan fraksi Persatuan Progresif, Demokrat, Partai Katolik, Partai NU, Parindra, Partai Buruh, Parkindo, Partai Murba, dan PSII, sedangkan tanggal 28 Juli hearing berlangsung dengan fraksi SKI, SOBSI, BTI, GTI, dan PERTI.¹⁰ Dalam proses hearing tersebut disampaikan keinginan para pemimpin partai untuk membentuk kabinet baru yang kuat.

Proses hearing yang berlangsung dari tanggal 26-28 Juli 1955 di kantor Wakil Presiden Merdeka Utara telah membawa hasil. Akhirnya pada hari jum'at tanggal 29 Juli 1955 pukul 11.55 WIB, Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk 3 orang formatur (pembentuk) kabinet baru yaitu Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Assaat (Non Partai). Assaat diharapkan mampu menjembatani kedua partai tersebut.¹¹ Kabinet yang diharapkan adalah suatu kabinet yang yang mendapat dukungan cukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari orang-orang yang jujur dan disegani. Ketiga formatur tersebut diberi batas waktu selama seminggu untuk mengusahakan pembentukan kabinet baru. Ketiga formatur tersebut mengadakan rapat yang kedua selama 2,5 jam, rapat pertama diadakan pada hari Sabtu malam tanggal 30 Juli 1955 yang bertempat di gedung Dewan Menteri. Program kabinet yang akan dibentuk adalah mengembalikan wibawa Pemerintah termasuk kepercayaan dari tentara

⁹ Merdeka, 27 Juli 1955, hlm. 1.

¹⁰ P.N. H. Simanjuntak. *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan. 2003, hlm. 148. Lihat juga Merdeka, 26 Juli 1955.

¹¹ Merdeka, 1 Agustus 1955, hlm. 1.

dan masyarakat umumnya, serta melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang tetap sehingga pembentukan parlemen dapat pula terjamin. Dengan program khusus seperti ini tentu kesulitan tidak lagi terletak pada penyusunan program dan kebijaksanaan kabinet, tetapi lebih pada orang-orang yang akan duduk dalam kabinet.

Tanggal 1 Agustus 1955, formatur kabinet menghadapi kesulitan. Kesulitan itu berkisar kepada tuntutan mutlak dari pihak Masyumi untuk menduduki kursi Perdana Menteri dan dua kursi Kementerian penting lainnya, tetapi keinginan itu ditolak PNI yang juga menghendaki kursi Perdana Menteri didapat oleh PNI. Kesulitan itu susah dipecahkan, sehingga sebelum rapat dimulai baik Wilopo maupun Sukiman perlu mengadakan pertemuan dengan masing-masing pimpinan dari partainya. Karena kesulitan itu susah untuk diatasi, kemudian Asaat mengusulkan agar Hatta dijadikan sebagai Perdana Menteri dan usul itu disetujui formatur lainnya. Pelaksanaannya akan diusahakan melalui Parlemen agar hambatan konstitusional dapat diatasi. Hatta pun bersedia menjadi Perdana Menteri, apabila disetujui oleh Parlemen. Resolusi dari Masyumi ini disetujui oleh Asaat dan Wilopo serta disetujui oleh para formatur agar Masyumi dan PNI mengemukakan hal ini pada Parlemen. Namun Masyumi melihat PNI tidak bersungguh-sungguh dalam tugasnya dan oleh karena itu Sukiman tidak perlu melanjutkan tugasnya. Persoalan ketidakseriusan PNI itu nampaknya menemui jalan buntu. Ketiga tokoh ini tidak berhasil membentuk kabinet baru. Akhirnya Rabu, tanggal 3 Agustus 1955 ketiga formatur mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden Moh. Hatta karena dirasa pembentukan kabinet baru mengalami banyak hambatan dan kesulitan.

Setelah pengembalian mandat oleh ketiga formatur tersebut, pada hari yang sama Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru tentunya dengan memperoleh dukungan yang cukup dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang didalamnya duduk orang-orang jujur dan disegani, yang bertugas terutama mengembalikan kewibawaan atau gezag moril Pemerintah i.c. kepercayaan Angkatan Darat dan Masyarakat kepada Pemerintah serta melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya Parlemen baru. Burhanuddin Harahap dipilih oleh Hatta karena dianggap seorang yang lebih akseptabel bagi banyak kalangan, ia yang berumur 38 tahun mencoba mengikutsertakan PNI. Namun usaha tersebut menemui jalan buntu. Akhirnya pada tanggal 11 Agustus 1955 Burhanuddin Harahap berhasil membentuk kabinet baru tanpa ikut sertanya PNI. Tidak ikut sertanya PNI bermula dari usul PNI yang tidak dapat diterima Masyumi. Dalam usul pertamanya PNI mencalonkan Hardi, Sunario, dan Rambitan sebagai

Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Usul keduanya, PNI mencalonkan A.K Gani sebagai Wakil Perdana Menteri serta mengusulkan agar kursi Pertahanan tidak diduduki Masyumi. Tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet pimpinan Burhanuddin Harahap diumumkan telah disahkan dengan Surat Keputusan Wakil Presiden tanggal 11 Agustus 1955 No. 141 tahun 1955. Keesokan harinya tanggal 12 Agustus 1955 pukul 08.00 WIB kabinet baru ini dilantik oleh Wakil Presiden Moh. Hatta di Istana Negara, selanjutnya pukul 10.30 diadakan timbang terima dengan kabinet Ali demisioner bertempat di gedung Dewan Menteri Pejambon.

C. Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet Nasional, karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Kabinet ini juga sering disebut kabinet koalisi, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa partai yang tidak duduk dalam kabinet seperti PNI dan beberapa partai lainnya. Susunan kabinet baru ini terdiri dari partai Masyumi, PIR Hazairin, PSII, Demokrat, NU, PSI, PKRI, Partai Buruh, PRN, Parindra, Parkindo, dan PRI serta seorang tidak berpartai. PNI dalam susunan kabinet ini tidak ikut serta. Sesuai nama kabinet ini, Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai formatur menempatkan diri sebagai perdana menteri. Proses terbentuknya kabinet Burhanuddin Harahap ini agak mengalami kesulitan yaitu sampai empat kali Wakil Presiden membentuk formatur kabinet, barulah yang keempat kalinya berhasil.

Kabinet Burhanuddin Harahap mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 12 Agustus 1955 setelah diadakan pelantikan dan serah terima dari kabinet Ali I. Jumlah menteri seluruhnya termasuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri Departemental, Menteri Muda, dan Menteri Negara semuanya 23 orang.¹² Partai-partai yang anggotanya ada di kabinet Burhanuddin Harahap ini antara lain: Masyumi (4 Menteri), PIR Hazairin (2 Menteri), PSII (2 Menteri), Demokrat (1 Menteri), NU (2 Menteri), PSI (2 Menteri), PKRI (1 Menteri), Partai Buruh (2 Menteri), PRN (2 Menteri), Parindra (2 Menteri), Parkindo (1 Menteri), PRI (1 Menteri), dan seorang menteri lagi tidak mewakili partai yaitu: Syamsuddin Sutan Makmur sebagai menteri Penerangan.

Kabinet ini didominasi oleh partai Masyumi walaupun terdapat banyak partai dalam kabinet ini, tetapi seakan-akan hanya menjadi pelengkap saja. Selain itu, ada pihak yang menyebut kabinet ini sebagai kabinet Masyumi

¹² Departemen Penerangan. Susunan Kabinet RI 1945-1970. Jakarta: Pradjna Paramita. 1970, hlm. 18-19. Lihat juga Merdeka, 13 Agustus 1955.

karena Masyumilah yang mendominasi kabinet ini. PNI tidak duduk dalam kabinet ini, tetapi PNI bersama-sama PIR Wongsonegoro, SKI, PKI dan Progresif bertindak sebagai oposisi. Seakan-akan kabinet ini sebagai ganti kabinet Ali- Wongso-Arifin, karena pada masa Kabinet Ali I sebagai partai yang besar Masyumi untuk pertama kali tidak duduk dalam kabinet tersebut dan bertindak sebagai oposisi.

Adapun komposisi kabinet Burhanuddin Harahap adalah sebagai berikut.

1. Perdana Menteri : Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi)
2. Wakil Perdana menteri I : R.Djanu Ismadi (PIR Hazairin)
3. Wakil Perdana Menteri II : Harsono Cokroaminoto (PSII)
4. Menteri Luar Negeri : Mr. Ide Anak Agung (Demokrat)
5. Menteri Dalam Negeri : Mr. R. Sunaryo (NU)
6. Menteri Pertahanan : Mr. Burhanudin Harahap (Masyumi)
7. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Joyohadikusumo (PSI)
8. Menteri Perekonomian : I. J. Kasimo (PKRI)
9. Menteri Pertanian : Moh. Sardjan (Masyumi)
10. Menteri Muda Perhubungan : Asraruddin (Partai Buruh)
11. Menteri Perhubungan : F. Loah (PRN)
12. Menteri Agraria : Mr. Gunawan (PRN)
13. Menteri Pekerjaan Umum : Rd. Pandji Suroso (Parindra)
14. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wariadinata (PSI)
15. Menteri Perburuan : Iskandar Tejakusuma (Partai Buruh)
16. Menteri Sosial : Sudibyo (PSII)
17. Menteri Agama : K. H. Moh Ilyas (NU)
18. Menteri P. P dan K : Prof. Ir. R. M. Suwandi (Parindra)
19. Menteri Kesehatan : Dr. J. Leimena (Parkindo)
20. Menteri Penerangan : Syamsuddin Sutan Makmur
21. Menteri Negara : Abdul Halim (Masyumi)
22. Menteri Negara : Sutomo/ Bung Tomo (PRI)

23. Menteri Negara : Drs. Comala Adjaib Nur (PIR)

Menteri-menteri dalam kabinet Burhanuddin Harahap ini banyak berasal dari dari Kabinet sebelumnya (Ali I) diantaranya: Mr. Sunaryo (Menteri Dalam Negeri), R.P. Suroso (Menteri Sosial), dan Sudibyo (Menteri Urusan Kesejahteraan Rakyat). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pemerintah Indonesia, Kabinet ini banyak mengalami tambal sulam dengan adanya pergantian para menteri. Periode ini pergantian para menteri sudah menjadi hal biasa. Baik karena menterinya mengundurkan diri ataupun diganti. Pergantian ini antara lain sebagai berikut.

1. Karena Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri I Ismadi. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, R. P Soeroso (Parindra) dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).

2. Karena Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan belum dilantik, maka untuk sementara dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri II Harsono. Baru pada tanggal 26 Agustus 1955, Prof. Ir. Suwandi (Parindra) dilantik menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang baru (berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 142 Tahun 1955).

3. Tanggal 18 Januari 1956, Wakil Perdana Menteri II Harsono Cokroaminoto dan Menteri Sosial Sudibyo, yang keduanya dari PSII mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Wakil Perdana Menteri II dihapus dan jabatan Menteri Sosial ad interim dirangkap oleh Menteri Sutomo.

4. Tanggal 19 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri Sunaryo dan Menteri Agama Moh. Ilyas yang keduanya dari NU megundurkan diri dari jabatannya. Kemudian, jabatan Menteri Dalam Negeri ad interim dirangkap oleh Menteri Suroso dan Menteri Agama ad interim dirangkap oleh Menteri Sarjan.

D. Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

Program kerja yang diusung kabinet ini juga tidak jauh berbeda dengan program kerja kabinet-kabinet sebelumnya. Burhanuddin hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam program kerjanya, hal ini mengingat bahwa Indonesia yang baru saja merdeka pada saat itu memiliki masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu periode kabinet saja. Program kerja yang dijadikan landasan kabinet baru ini ialah rancangan program kerja yang disetujui ketiga formatur sebelumnya, yaitu Sukiman, Wilopo dan Assaat. Berikut merupakan

Program Kerja yang telah diajukan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap¹³ :

1. Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moral pemerintah, i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah.
2. Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru.
3. Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga.
4. Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi.
5. Memberantas korupsi.
6. Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Memperkembangkan politik kerjasama Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

E.Masa Pemerintahan Sebelum Kabinet Burhanuddin Harahap

Pasca Indonesia merdeka keadaan ekonomi di Indonesia sangat kacau Karena pada waktu itu Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Selain itu Inflasi yang terjadi karena di satu sisi tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar sangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sangat rendah.

Selanjutnya setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, Indonesia merubah sistim pemerintahannya yang tadinya menggunakan sistim liberal dirubah menjadi sistim parlementer. Dasar negara yang digunakan pun turut dirubah yaitu menggunakan UUDS 1950. Sistem demokrasi parlementer ternyata kurang tepat digunakan di negara yang baru saja merdeka seperti Indonesia pada saat itu. Dalam periode demokrasi parlementer ini ditandai dengan munculnya banyak partai politik dan sering terjadinya pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang, yang menyebabkan programnya tidak berjalan dengan tuntas. Persaingan antar partai, gonta ganti kabinet dan program-program kerja yang terbengkalai membuat kondisi sosial,ekonomi, serta politik di Indonesia menjadi tidak stabil.

Pemerintahan setiap kabinet memberi dampak tersendiri terhadap keadaan sosial ekonomi bangsa pada

saat itu. Kabinet pertama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kabinet Natsir. Kabinet ini terbentuk pada tanggal 6 September 1950. Kabinet ini merupakan koalisi antara partai Masyumi dengan partai kecil lainnya dan beberapa golongan non partai. Pada masa pemerintahan kabinet Natsir keadaan ekonomi Indonesia mengalami deficit keuangan, hal ini disebabkan karena gagalnya system gerakan ekonomi banteng yang digagas oleh Sumitro Djojohadikusumo yang menjabat sebagai Menteri perdagangan. Kegagalan tersebut dikarenakan berbagai faktor yaitu seperti:

1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5. Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.
6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Selain itu keadaan politik pada masa kabinet ini sangat tidak stabil, mengingat kabinet ini merupakan kabinet pertama pada masa demokrasi Parlementer. Pada awal terbentuknya kabinet, Presiden memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan kabinet ini. Selain itu, Natsir yang ditunjuk Presiden untuk menjadi formatur Kabinet telah menetapkan suatu sikap yang menyulut perpecahan partai dalam pemerintahan. Hal ini nampak pada saat menyusun kabinet, Natsir telah menetapkan sikap bahwa posisi Masyumi di Kabinet harus memberikan pengaruh yang lebih besar dari partai lainnya yang duduk dalam kabinet.¹⁴ Karena tidak mendapat dukungan dari PNI, Kabinet Natsir memutuskan membentuk kabinet tanpa mengikutsertakan PNI di dalamnya. Secara tidak langsung kabinet Natsir telah

¹⁴ Waluyo. Dari pemberontak menjadi Pahlawan Nasional: Mohammad Natsir dan Perjuangan politik di Indonesia. Yogyakarta: Ombak. 2009, hlm.80.

¹³ ANRI. *Kabinet Presiden RI No. 1396 tahun 1955*, hlm. 13.

mendorong PNI untuk berperan sebagai partai oposisi. Kritik tajam juga datang dari partainya sendiri. Masyumi menilai Natsir sebagai perdana menteri yang menyalahi keputusan Kongres Desember 1949 yang melarang ketua umum partai menjadi menteri.¹⁵ Banyaknya pertentangan dari partai-partai menunjukkan bahwa pemerintahan pada saat itu masih sangat mementingkan kepentingan partai dan mengesampingkan kepentingan negara. Banyaknya pemerintah yang sibuk mengejar idealisme partai membuat para pemimpin tersebut saling menjatuhkan.

Hal tersebut menjadi alasan jatuhnya kabinet ditambah dengan kegagalan dalam masalah Irian Barat yang juga menyebabkan terjadinya pertentangan antara Natsir dan Presiden Soekarno. Proses yang mempercepat jatuhnya kabinet ini adalah setelah 2 orang menteri dari PIR Mr. Wongsonegoro dan Prof Ir. Johannes menarik diri dari kabinet, sebagai suatu Kabinet *dri impasse* yang diciptakan ketika parlemen tetap berpegang teguh terhadap mosi S. Hadikusumo dari PNI. Mosi S. Hadikusumo ini tentang pencabutan PP No. 39 Tahun 1950 mengenai pembekuan DPRD, sehingga kabinet Natsir mundur. Pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya pada Presiden Soekarno.

Kabinet Sukiman merupakan kabinet pengganti setelah kabinet Natsir. Namun, terdapat satu momen ekonomi yang cukup penting dan mempengaruhi perkembangan perekonomian Bangsa Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari program-program Kabinet Sukiman yang berpegang pada politik bebas-aktif dan kecenderungan politik yang condong kepada Amerika Serikat. Hal tersebut sesuai dengan beberapa program Kabinet Sukiman, diantaranya mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan petani. Juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan usaha.¹⁶

Kemudian, mengenai kebijakan politik bebas-aktif pada masa Kabinet Sukiman, dikutip sebagai berikut, "Politik luar negeri: menjalankan politik luar negeri secara bebas dan aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya." Politik luar negeri pada era Kabinet Sukiman sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dalam salah satu catatan sejarah nasional, Indonesia pernah memperoleh persetujuan dari Amerika Serikat tentang bantuan ekonomi dan teknik seharga \$ 50 juta.¹⁷ Ini adalah langkah luar biasa yang pernah dicapai oleh suatu masa pemerintahan yang sangat

pendek. Kabinet yang tidak bertahan lama ini kemudian jatuh dengan kondisi perekonomian bangsa yang tidak terlalu baik dimana harga beras menunjukkan tanda-tanda kenaikan.

Pada masa Kabinet Wilopo yang dibentuk pada 1 april 1952, kondisi perekonomian bangsa yang tidak jauh berbeda dengan kabinet yang sebelumnya. Sayangnya, masih pada tahun yang sama dengan saat kabinet ini dibentuk, terjadi sebuah kekacauan pemerintahan akibat persoalan-persoalan militer yang diawali oleh penurunan jumlah penerimaan devisa negara yang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia kurang menguntungkan hasil ekspor Indonesia. Kekacauan ju¹⁸ga juga dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober (1952).

Pada masa Kabinet Wilopo bekerja, terdapat perkembangan politik yang menarik, yakni berubahnya Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sebuah partai politik, dan perubahan haluan Partai Komunis Indonesia (PKI). Perubahan NU menjadi partai politik berawal dari keluarnya NU dari Masyumi pada 31 juli 1952 dan berdiri sebagai partai baru pada 30 Agustus 1952. Pada tanggal yang sama juga bersama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyan Islam (Perti) membentuk Liga Muslim Indonesia. Keluarnya NU dari Masyumi dipicu oleh pertikaian antara modernis Islam Muhammadiyah dengan Islam "kolot" NU. Tokoh-tokoh NU merasa dilangkahi saja oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam kancah politik.⁵ Karena hal itu pilihan terakhir bagi NU agar terus eksis adalah dengan menjelmakan diri sebagai partai politik dan berpisah dari Masyumi. Perubahan haluan NU ini murni karena konflik dalam tubuh Masyumi sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain. Ternyata kondisi pecahnya Masyumi sangat menguntungkan bagi PNI. Dengan pecahnya Masyumi, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dapat muncul sebagai partai terbesar.

Selain masalah NU, perubahan haluan yang terjadi pada PKI juga menjadi sorotan menarik dalam perjalanan kabinet Wilopo. Pada bulan Agustus 1951 pada masa pemerintahan Kabinet Soekiman telah terjadi pembersihan terhadap anggota-anggota PKI yang dianggap menentang pemerintah. Pada gerakan awal pembersihan sekitar 200 orang ditangkap, sampai beberapa kali razia dilakukan hampir 2.000 tokoh-tokoh kiri dipenjarakan.¹⁹ Pasca peristiwa itu PKI menjadi lemah. Dibawah kepemimpinan D.N. Aidit PKI mengubah haluan gerakannya demi mengembalikan kekuatannya dalam pemerintahan. PKI yang gerakannya selalu diidentikan dengan radikalisme kini harus bekerja sama dengan partai-partai dalam front

¹⁵ Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press. 1987, hlm. 205.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, hal. 86.

¹⁷ G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 Jilid 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*, hal. 85-86.

¹⁸ *Ibid.* hal, 88.

¹⁹ Abdullah. *Langkah Merah : Gerakan PKI 1950-1955*. Yogyakarta: Bentang. 1996, hlm. 32-33.

persatuan nasional dan mendukung pemerintahan kabinet Wilopo meskipun di dalamnya terdapat tokoh-tokoh Masyumi.²⁰ Dalam sejarah PKI dan Masyumi selalu bersebrangan hal ini dikarenakan perbedaan ideologi antara keduanya. Ketika PKI mulai aktif kembali dalam pemerintahan, Masyumi menunjukkan sikap yang antipati dan perlawanan terhadap partai tersebut. Namun PKI tetap dapat diuntungkan dengan keadaan Masyumi pasca keluarnya NU. Dengan hal ini PKI dapat dengan mudah menghadapi lawan politiknya tersebut.

Taktik yang digunakan PKI ini sangat menguntungkan. Selain posisinya kembali aman PKI juga memulai hubungan baiknya dengan PNI. Dukungan PKI terhadap pemerintahan juga semakin digencarkan. Pada tanggal 22 April 1952 PKI mengeluarkan pernyataan mendukung kabinet, selain itu delapan hari kemudian diikuti Jaminan PKI untuk melarang Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) untuk menggerakkan aksi-aksi pemogokan.⁸ Akibat pemogokan-pemogokan dan kerusuhan yang sering terjadi pada masa pemerintahan Soekiman kini mulai mereda bahkan tidak lagi terjadi. Selain menguntungkan pemerintahan, hal ini juga menguntungkan bagi pihak PKI. Maka PKI akan terus memberikan dukungannya terhadap Wilopo selama pemerintah tetap bersifat Progresif dan antifasis.

Perkembangan politik dari NU dan PKI hanyalah salah satu peristiwa yang mewarnai perjalanan kabinet ini. Sama halnya seperti kabinet-kabinet sebelumnya, dalam menjalankan tugasnya Wilopo juga mengalami berbagai macam hambatan. Banyak masalah berat yang harus dihadapi oleh kabinet ini, diantaranya Peristiwa 17 Oktober 1952 dalam TNI Angkatan Darat sebagai ledakan rasa amarah dari pihak militer terhadap campurtangan kaum politikus terhadap soal-soal intern Angkatan Darat.

Kabinet ini kemudian berakhir setelah kabinet mengembalikan mandate kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953 akibat persoalan di perkebunan asing di Tanjung Morawa, Sumatra Timur. Sesuai dengan hasil persetujuan KMB, tanah yang pernah dimiliki oleh para kontraktor – dalam hal ini yang menjadi kontraktor adalah pihak asing – pada masa penjajahan Jepang, diambil alih kembali oleh mereka. Keputusan ini disambut dengan protes oleh para petani sekitar dan terjadi peristiwa penembakan oleh polisi yang memakan korban jiwa.

Kabinet berikutnya terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1953 dengan Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjoyo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (PIR). Kabinet ini dikenal dengan turut sertanya Nahdatul Ulama (NU) setelah keluar dari Masyumi. Pergolakan

bangsa yang lebih banyak terjadi pada bidang politik luar dan dalam negeri terkait masalah diplomasi dalam konferensi-konferensi membuat kurangnya perhatian terhadap masalah ekonomi bangsa. Seperti yang dikatakan dalam sejarah bahwa Konferensi Asia-Afrika merupakan puncak dari Kabinet Ali I.

Namun, dibalik kesuksesan diplomatik tersebut, tersimpan berbagai persoalan seperti inflasi melaju dan korupsi yang meluas. Selain itu terjadi skandal lisensi istimewa (untuk impor barang), dan nepotisme yang memicu terjadinya kekacauan ekonomi. Sampai pada tanggal 27 Juni 1955, Kabinet Ali I masih berada diambang jurang kejatuhannya; hidup rakyat melarat, korupsi meluas. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali mengembalikan mandat kepada Wakil Presiden sementara Presiden sedang melaksanakan ibadah haji.

Seperti halnya dengan kabinet-kabinet terdahulu, kabinet Ali juga mengalami kegagalan dalam kebijakan ekonominya. Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:

1. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
2. Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
3. Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

1. Kebijakan Sosial Ekonomi Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Ali Sastroamidjoyo I mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Kemudian sebagai gantinya Wakil Presiden Moh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap sebagai formatur kabinet. Tanggal 11 Agustus 1955, Kabinet pimpinan Burhanuddin Harahap diumumkan dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Wakil Presiden No. 141 tahun 1955.²¹ Keesokan harinya tanggal 12 Agustus 1955, diadakan pelantikan dan serah terima. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dengan partai-partai kecil lainnya. Ketika selesai dilantik, Kabinet Burhanuddin Harahap nampak semangat untuk memulai tugas-tugasnya terutama dalam mengembalikan kestabilan ekonomi Indonesia.

2. Kebijakan Sosial Politik Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dengan partai-partai kecil lainnya. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap di Indonesia,

²⁰ Herbert Feith. *The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in PostRevolutionary Indonesia*. New York: Cornell University Press. 2009, hlm. 101.

²¹ ANRI. *Kabinet Presiden Republik Indonesia No. 1396*, hlm. 12.

terdapat perkembangan sosial politik yang sangat menarik. Diawal terbentuknya kabinet ini saja, terdapat pertentangan antara Masyumi dan PNI. Pertentangan ini dimulai ketika pembentukan komposisi kabinet oleh formatur Burhanuddin Harahap. PNI menuntut kursi Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum. Selain itu, PNI juga menuntut agar kursi Menteri Pertahanan tidak diduduki Masyumi. Oleh sebab itu, maka Burhanuddin Harahap tidak mengikutsertakan PNI dalam komposisi kabinetnya. Hal ini berarti PNI duduk sebagai partai oposisi yang cukup kuat terhadapnya di Parlemen, karena tentu saja PKI akan memberi bantuan pada PNI dalam hal ini. Menghadapi hal tersebut, Masyumi mencari kawan sebanyak-banyaknya walaupun terdiri dari partai-partai kecil. Tetapi Masyumi beruntung mendapat dukungan dari NU dan PSII yang bersedia turut duduk dalam komposisi kabinet. Hal ini sangat membahagiakan bagi formatur Burhanuddin Harahap dari Masyumi, dengan ikutnya NU berarti merentang jalan untuk mengembalikan kerjasama umat Islam di Indonesia. Mengingat pada masa Kabinet Wilopo berkuasa, terdapat perselisihan antara NU dan Masyumi. NU merasa tidak puas selama menjadi satu dengan Masyumi. Akhirnya perselisihan antara NU dan Masyumi ini berbuntut keluarnya NU dari Masyumi. Tidak hanya mendapat dukungan dari NU dan PSII, kabinet Harahap juga bekerjasama dengan partai-partai lain seperti PIR, Hazairin, Demokrat, PSI, PKRI, Partai Buruh, PRN, Parindra, Parkindo, dan PRI.²²

F. Berakhirnya Pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Burhanuddin Harahap dalam masa pemerintahannya telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada saat itu. Program kerja yang dilaksanakan pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap banyak yang sukses dan berhasil dan secara tidak langsung juga membawa kemajuan yang pesat dalam beberapa bidang bagi Indonesia. Seperti halnya kabinet-kabinet sebelumnya, dalam pemerintahan kabinet ini tidak berjalan semulus dan semudah yang dibayangkan. Terdapat beberapa hal yang membuat kabinet ini berakhir dan digantikan oleh kabinet baru.

Sejak awal terbentuknya kabinet ini sudah mendapat tugas khusus yang harus dilakukan yaitu mengembalikan kewibawaan moril Pemerintah, termasuk kepercayaan AD dan masyarakat kepada Pemerintah. Karena pada masa Kabinet Ali I jatuh karena peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Kemudian banyaknya aparatur pemerintah yang melakukan korupsi juga menambah citra buruk bagi

kewibawaan Pemerintah dimata Angkatan Darat dan masyarakat. Tetapi dalam menghadapi masalah ini, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengatasi masalah Angkatan Darat dan korupsi yang merajalela. Dalam menyelesaikan masalah Angkatan Darat, Kabinet Burhanuddin Harahap mengangkat kembali A.H. Nasution yang dibebastugaskan sebagai KSAD.

Sedangkan korupsi, Kabinet Burhanuddin Harahap mengatasinya dengan cara mengadakan kampanye korupsi dan menindak tegas siapapun tanpa pandang bulu jika ia terbukti terlibat korupsi bahkan menyeretnya ke tahanan. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap dalam mengatasi kedua masalah tersebut dapat dikatakan berhasil. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mendapat simpati dan dukungan dari kalangan Angkatan Darat serta masyarakat. Pada masa ini hubungan antara Angkatan Darat dengan Pemerintah juga terjalin dengan baik.

Namun sangat disayangkan, setelah berhasil mengembalikan disiplin dalam Angkatan Darat timbul masalah baru dalam Angkatan Udara. Semasa Kabinet Ali I, ketidaksenangan yang timbul dalam Angkatan Udara dipertajam dengan Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri. Untuk mengurangi ketidaksenangan tersebut, Kabinet Burhanuddin mengangkat Komodor Muda Udara Hubertus Sujono sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Udara. Tetapi upacara pelantikan di Pangkalan Udara Cililitan (Halim Perdanakusuma sekarang) pada tanggal 14 Desember 1955, yang tidak dihadiri oleh Surjadarma, digagalkan oleh beberapa anggota yang membangkang dengan menimbulkan insiden berupa antara lain pemukulan Komodor Sujono oleh beberapa orang bawahan serta perebutan pataka angkatan.²³ Menteri Pertahanan yang tidak lain adalah Perdana Menteri Harahap sendiri segera mengambil tindakan keras terhadap mereka yang membangkang, termasuk pada KSAU Surjadarma sendiri yang terlibat dalam masalah ini. Selain KSAU, seorang sersan Angkatan Udara yang melakukan tindakan pengacauan pada upacara di Cililitan itu telah ditahan. Wakil Presiden Moh. Hatta sendiri menyetujui langkah Menteri Pertahanan Harahap tersebut dalam menyelesaikan Peristiwa Cililitan. Namun, Sujadarma yang dikenai tahanan rumah segera dibebaskan atas campur tangan Presiden. Kabinet sendiri berbeda pendapat dalam mencari penyelesaiannya. Akhirnya, kabinet menyetujui untuk menyerahkan penyelesaian ini kepada Gabungan Kepala Staf serta Jaksa Agung. Tetapi bulan Januari 1956, Sersan Kalebos yang termasuk terlibat dalam insiden tersebut dikeluarkan dari tahanan. Kemudian tidak terdengar kabar lagi tentang penyelesaian

²² P.N.H Simanjuntak. Op. cit, hlm. 150.

²³ A.B. Lopian. *Terminologi Sejarah 1945-1949 & 1950-1959*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1996, hlm. 242.

ini. Para perwira yang diangkat semula terus saja tidak diangkat.

Sementara itu sesuai dengan programnya yang kedua, Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil melaksanakan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Konstituante (Badan Pembuat Undang-Undang Dasar). Adapun empat partai muncul sebagai pemenang yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), dan PKI sebagai partai besar merupakan suatu hal yang sebelumnya tidak terduga. Meleset dari yang diharapkan, ternyata jumlah partai tidak berkurang namun bertambah dengan adanya pemilihan ini. Pemilihan umum pertama di Indonesia ini, pelaksanaannya baik. Pemilu sendiri berjalan secara demokratis, bebas dari segala bentuk ancaman serta rahasia. Untuk sekelompok bangsa Indonesia yang kala itu belum maju, pelaksanaan pemilu ini sungguh mengesankan.

Setelah pemilihan umum diselenggarakan, perhatian Kabinet ditujukan tentang cara menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dengan Belanda, khususnya mengenai pembatalan perjanjian KMB. Dalam perjuangan menghadapi Belanda Kabinet Burhanuddin Harahap tidak berhasil pula. Perundingan Menteri Luar Negeri Anak Agung Gde Agung di Jenewa Desember 1955-Februari 1956 tidak berhasil membujuk Belanda untuk membatalkan Uni dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi keuangan yang berarti, apalagi Irian Barat. Berbagai partai bahkan Presiden Soekarno sendiri tidak mendukung perundingan itu karena toh tidak akan membawa hasil. Beberapa hal diantara masalah yang menyangkut keputusan Perdana Menteri dalam perundingan ini, menyebabkan kembalinya perpecahan dalam lingkungan Masyumi serta partai-partai Islam sehingga permulaan yang menguntungkan bagi mereka pada saat kabinet mulai bekerja tidak dapat diteruskan. Persetujuan antara umat Islam kembali terjadi yaitu antara NU, PSII dan Masyumi. NU dan PSII bahkan menarik menteri-menterinya. Sedangkan dalam tubuh Masyumi sendiri perpecahan itu ditandai dengan Kelompok Sukiman dan Kelompok Natsir yang kembali memperlihatkan hubungan yang tidak harmonis, seperti tercermin dalam berbagai pernyataan yang kedua kubu itu lontarkan. Meskipun tidak mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, kabinet mempunyai keberanian untuk membubarkan Uni Indonesia Belanda secara unilateral (sepihak) pada tanggal 13 Februari 1956 dan akan mengadakan tindakan lebih lanjut berhubungan dengan persetujuan KMB.

Parlemen, tanpa PNI dan PSII menerima Undang-undang Pembatalan Uni. Tetapi kabinet terpukul oleh

ketidaksediaan Presiden menandatangani Undang-undang itu dengan alasan bahwa pembatalan persetujuan KMB hendaklah menyeluruh dan menanti kabinet yang didukung oleh parlemen hasil pemilu.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan pada tanggal 2 Maret 1956, pada tanggal yang sama dalam sidangnya kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara tanggal 3 Maret 1956. Tanggal 3 Maret 1956, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun diterima Presiden Soekarno, dan Kabinet dinyatakan demisioner. Namun kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya Kabinet baru.

Jadi kabinet ini sebenarnya hampir sama dengan kabinet-kabinet lain, berakhir karena terdapat keretakan dalam tubuh kabinet sendiri. Walau dikatakan berhasil di dalam melaksanakan tugas khususnya, namun akhirnya meletakkan jabatannya juga setelah Parlemen hasil pemilu dilantik. Kabinet ini kehilangan prestigenya ketika usahanya mengontrol Angkatan Udara gagal, tidak adanya restu dari Presiden Soekarno, dan gagalnya menyelesaikan masalah-masalah hubungan Indonesia-Belanda. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner.

PENUTUP

Simpulan

Burhanuddin Harahap dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1917 di Medan Sumatera Utara. Burhanuddin Harahap merupakan putra dari pasangan suami istri Muhammad Yunus dan Siti Nurfiyah. Burhanuddin Harahap aktif dalam beberapa organisasi pemuda dan organisasi politik yang membawanya ke kursi Perdana Menteri. Terpilihnya Burhanuddin Harahap sebagai perdana menteri tidak lepas dari jatuhnya kabinet Ali Sastroamidjono I yang dikarenakan Peristiwa Angkatan Darat 27 Juni 1955. Kemudian Wakil Presiden Moh. Hatta melimpahkan tugas tersebut kepada Burhanuddin Harahap dan menunjuknya sebagai formatur yang baru. Program Kabinet Burhanuddin Harahap terdiri dari tujuh poin yaitu: (1) Mengembalikan kewibawaan (Gezag) moral pemerintah, i.e. kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada Pemerintah, (2) Melaksanakan Pemilihan Umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru, (3) Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, (4) Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, (5) Memberantas korupsi, (6) Meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia, (7) Memperkembangkan politik kerjasama

Asia-Afrika, berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian.

Pada masa pemerintahan Burhanuddin Harahap terdapat peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan sosial, ekonomi, serta politik masyarakat Indonesia. Kabinet Burhanuddin Harahap segera menyelesaikan masalah-masalah ekonomi terutama inflasi, karena menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Kabinet Burhanuddin Harahap berhasil mengatasi masalah inflasi yaitu dengan jalan mengadakan penghematan keras dalam banyak pengeluaran, terutama pengeluaran rutin yang berlebihan, menyempurnakan penerimaan pajak dan memperbaiki cara-cara dan dasar pemungutan, terus berlangsungnya serta dipegang teguh peraturan yang telah berjalan mengenai pengawasan preventif oleh pihak Kementerian Keuangan. Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk didalamnya menekan harga barang-barang, baik harga barang impor maupun harga beberapa macam barang-barang dalam negeri yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Setelah menjadi perdana menteri, Burhanuddin Harahap segera melancarkan kampanye antikorupsi. Hal ini karena pemberantasan korupsi dirasa merupakan salah satu usaha yang utama untuk menyetatkan keadaan ekonomi negara melalui gerakan antikorupsi dan dianggap dapat memulihkan kewibawaan Pemerintah, memperbaiki administrasi pemerintahan, untuk menyetatkan kembali alat-alat serta cara pembangunan Negara disegala bidang. Burhanuddin juga menindak tegas bahkan menjebloskan ke dalam tahanan bagi siapa saja yang terbukti melakukan korupsi. Kabinet Burhanuddin juga berhasil melaksanakan pemilihan umum yang pertama kali di Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum juga berjalan secara aman, tertib dan demokratis. Setelah pemilihan umum diselenggarakan, dan dalam hubungan Indonesia Belanda, kabinet berhasil menempatkan kedudukan Indonesia pada tempat yang lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Setelah hasil suara pemilihan umum diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan pada tanggal 2 Maret 1956, pada tanggal yang sama dalam sidangnya kabinet Burhanuddin Harahap memutuskan untuk menyerahkan mandatnya kepada Kepala Negara tanggal 3 Maret 1956. Tanggal 3 Maret 1956, penyerahan mandat oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pun diterima Presiden Soekarno, dan Kabinet dinyatakan demisioner. Namun kabinet Harahap masih melaksanakan tugasnya seperti biasa sampai terbentuknya Kabinet baru yaitu kabinet Ali Sastroamidjoyo II. Dengan demikian, Kabinet Harahap hanya bertahan selama hampir 7 bulan sebelum demisioner..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- _____. 2012. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- _____. 2001. Pengantar Ilmu Sejarah (cet. IV). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- _____. 1954. Tonggak-tonggak perjalananku. Jakarta: Kinta.
- _____. 1956. Kabinet RI ke XV: Kabinet Burhanuddin Harahap. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Abdul Haris Nasution. 2013. Peristiwa 17 Oktober 1952 : Ketika “Moncong” Meriam Mengarah ke Istana Merdeka. Yogyakarta : Narasi.
- Abdullah. 1996. Langkah Merah : Gerakan PKI 1950-1955. Yogyakarta : Bentang.
- Ali Sastroamidjoyo. 1954. Pendapat Pemerintah terhadap Mosi Mr. Jusuf Wibisono. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.
- Anwar Harjono. 1997. Perjalanan Politik Bangsa. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2004. Jakarta: Proyek dan Diseminasi Kearsipan Nasional.
- Bibit Suprpto. 1985. Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dadang Supardan. 2011. Pengantar Ilmu Sosial : Sebuah kajian pendekatan structural. Jakarta : Bumi Aksara.
- Deliar Noer. 1987. Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta: Grafity
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Departemen Penerangan. 1970. Susunan dan Program Kabinet Republik Indonesia selama 25 Tahun. Jakarta : Pradnja Paramita.
- Feith Herbert. 2009. The Wilopo Cabinet 1952-1953 : A Turning Point in Post Revolutionary Indonesia. New York: Cornel University Press.
- Helius Sjamsuddin. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- I Gde Widja. 1989. Sejarah Lokal dan Perspektif dalam Pengajaran Sejarah. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kardiyat Wiharyanto, A. 2011. Sejarah Indonesia : Dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. 1955. Keterangan dan Jawaban Pemerintah atas Program Kabinet Burhanuddin Haarap. Jakarta:Kementerian Penerangan.
- Kuntowidjoyo. 1994. Metodologi Sejarah. Jakarta: Tiara Wacana.
- Lapian, A.B dkk. 1996. Terminologi Sejarah 1945-1949 & 1950-1959. Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai TRadisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Marbun, B.N. 2003. Kamus Politik. Jakarta: pustaka sinar harapan
- Marwati Djoenet Puspongoro dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedjanto , G. 1992. Indonesia abad 20 jilid II. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution. 2011. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Press.
- Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat. 1965. Sejarah TNI Angkatan Darat 1945- 1965. Bandung: Pussemad.
- Redaksi Great Publisier. 2009. Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan, dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: GalangPress.
- Saefur Rochmat. 2009. Ilmu Sejarah dalam Perspektif Ilmu Sosial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sartono Kartodirdjo. 1993. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.
- Simanjutak, P.N.H. 2003. Kabinet-Kabinet Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi. Jakarta : Djambatan.
- Suwanta. 2000. Keberanian Untuk Takut: Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI. Yogyakarta: Avyrouz.
- Wilopo S. H. 1976. Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya. Jakarta :Yayasan Idayu.
- Yahya A. Muhaimin. 2002. Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia 1945-1966. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zulkarnain. 2012. Jalan Meneguhkan Negara: Sejarah Tata Negara Indonesia. Yogyakarta : Pujangga Press.
- B. Arsip**
- ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 1648 Tahun 1956.
- ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2219 Tahun 1955.
- ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2222 Tahun 1955.
- ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2228 Tahun 1955.
- ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2230 Tahun 1955.
- ANRI. Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia No. 2234 Tahun 1955.
- ANRI. Kabinet Presiden Republik Indonesia No. 1396 Tahun 1955.
- C. Majalah/Jurnal/Skripsi**
- Baskara T. Wardaya. 2004. “Membuka Kotak Pandora Pemilu 1955”. Basis. No.03-04. Tahun ke-53
- Lukman Ramdhani F. 2013. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1955. FIS UNESA.
- Rhoma Dwi Aria Yuliantri. 2011. “Catatan Singkat Soekiman: Sepuluh Bulan Menjadi Perdana Menteri”. Basis. No. 03-04. tahun ke-60
- Wawan Riyadi. 2004. Hubungan Sipil Militer Selama Demokrasi Parlementer Tahun 1950-1959. FIB UGM.
- D. Surat Kabar**
- Abadi 24 Januari 1956, 8 Februari tahun 1956
- Abadi tanggal 1 agustus, 22 agustus, 23 oktober, 13 Desember 1955
- Merdeka tanggal 29 Oktober, 8 November tahun 1955
- Merdeka, tanggal 19,20 Januari , 23 Februari, 7 Maret, 17 Maret 1956
- Merdeka, tanggal 27 Juli dan 1 , 2, 12 agustus tahun 1955